

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE***
(Studi Pada *Cybercrime* Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Gumelar Fajar Asmara Lubis *
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital, termasuk judi online atau *cyber gambling*, yang kini menjadi fenomena global dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia, Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi *online*, Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan.

Tindak pidana perjudian, terutama yang dilakukan secara online, dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber karena memanfaatkan teknologi komputer, internet, dan perangkat mobile sebagai alat untuk menjalankan aktivitas perjudian. Perjudian online melibatkan elemen kejahatan tradisional (perjudian) yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi digital, sehingga memenuhi kriteria kejahatan siber.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* didasarkan pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Hambatan penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut adalah sangat kompleks dan mencakup berbagai faktor, seperti adanya celah dalam regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, keterbatasan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi *Online*.

**Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE
GAMBLING CRIMINAL ACTS**
(Study on Cybercrime Ditreskrimsus North Sumatra Regional Police)

Gumelar Fajar Asmara Lubis *
Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., CN**
Dr. Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**

ABSTRACT

The development of information technology has facilitated public access to various digital services, including online gambling or cyber gambling, which is now a global phenomenon and has given rise to various legal problems. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulations for online gambling crimes apply in Indonesia, How is law enforcement carried out by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda Sumut against perpetrators of online gambling crimes, What are the obstacles and efforts of law enforcement by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda Sumut to overcome these obstacles. The research method used is descriptive analysis that leads to normative and empirical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and field research.

Gambling crimes, especially those carried out online, can be categorized as cybercrimes because they utilize computer technology, the internet, and mobile devices as tools to carry out gambling activities. Online gambling involves elements of traditional crime (gambling) that are integrated with the use of digital technology, thus meeting the criteria for cybercrime.

The results of the discussion conclude that the legal provisions for online gambling crimes in Indonesia are regulated in Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Law enforcement against perpetrators of online gambling crimes is based on Article 303 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law. Obstacles to law enforcement by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda Sumut are very complex and include various factors, such as loopholes in regulations, difficulties in cross-border law enforcement, and limited human resources.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Online Gambling.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*